

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH
MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA
(Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh

REPI SUSANTI

NPM : 1521020293

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH
MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA**

**(Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

REPI SUSANTI

NPM : 1521020293

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

Tokoh masyarakat merupakan masyarakat yang menduduki posisi yang penting, tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan negara. Tokoh masyarakat mempunyai tugas dan fungsi yang penting selain mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat juga mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekon.

Dari latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya, dan Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya way Rantang Kecamatan Lemong. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya, dan Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya way Rantang Kecamatan Lemong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini *deskriptif analisis* yaitu membuat *deskriptif*, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library reseach*) berupa Al-Quran, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tokoh masyarakat di *pekon* Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di desa. Tokoh masyarakat berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik hukum masyarakat serta menyalurkan berbagai pendapat dalam musyawarah desa. Analisis *fiqh siyasah* terhadap peran tokoh masyarakat sudah menjalankan perannya yaitu amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai kegiatan. Konsep amanah memberikan arti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh
Masyarakat Dalam Pemekaran Desa (Studi
di Pekon Suka Mulya Way Rantang
Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir
Barat)**

**Nama : Repi Susanti
NPM : 1521020293
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Erina Pane, S.h., M.Hum.
NIP.197005022000032001**

**Eko Hidayat, S.Sos., MH.
NIP.197512302003121002**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**

**Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukaramo 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat), disusun oleh: Repi Susanti, NPM: 1521020293, program studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Selasa, 11 Juni 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

Sekretaris

: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I

: Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom. I

(.....)

Penguji II

: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)



Dekan

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-Imran:104)¹.



¹Departemen Agama, RI. Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: Cv Putra Sejati Raya, 2003), h. 413.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, dengan cinta kasih Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah tercinta, Anwar, berkat doa restu darinyalah penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih ayahku yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendidikan putrimu yang kamu sayangi.
2. Ibu tersayang, Amala, terimakasih atas nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosan ibu berikan kepada penulis untuk mencapai kesuksesan. Terimakasih telah mengandung, melahirkan, dan merawatku hingga menjadi seperti ini. Karya sederhana ini yang penulis persembahkan tidak sejujung kuku pun dapat membalas perjuangan kalian tetapi penulis berharap karya ini akan sedikit memberikan rasa bangga dan senyum kebahagiaan di wajah yang sudah mulai menua dan sedikit membayar lelah dan letih atas perjuangan kalian.
3. Kakak-kakakku tercinta, Marheni, Ikrom Efendi, Helda Yani, Susi Erlina (Alm), Roma Diansyah, Sahren, Yalnita, Suprianto, Lisma Wati, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa kalian kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta rezekinya kepadamu.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Saudara-saudaraku keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



RIWAYAT HIDUP

Repi Susanti, lahir pada tanggal 20 November 1997 di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Anwar dan Ibu Amala. Beralamat di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SD N 1 Bandar Pugung pada tahun 2003.
2. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 1 Lemong pada tahun 2009. Selama duduk di bangku SMP penulis menjadi anggota pramuka, paskibra dan paduan suara.
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMA N 1 Lemong pada tahun 2012. Selama penulis menempuh pendidikan penulis aktif di bidang ekstrakurikuler pramuka dan paduan suara.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah jurusan Siyash.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PROSES PEMEKARAN DESA (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaalloh mendapat syafaat di hari akhir, aamiin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs, Susiadi As, M.Sos.i. selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

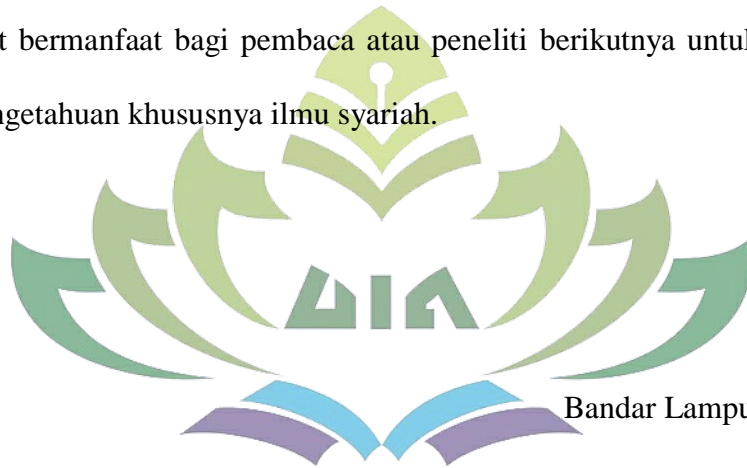
4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., MH. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
8. Kepala *Pekon* beserta Perangkat *Pekon*, Kepala RT, Tokoh Masyarakat, dan seluruh Masyarakat *pekon* yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Siyasa Angkatan 2015, wabil khusus Siyasa E: Yunnita, S.H, Kimel, Elisa, Ria Dwi, Anggraini, Nadiyah, Ice, Mayang, Tiara, Fitriani, Habib, Ovi, Jodi, Andre, Billi, Yedi, Khomsi Juniardi, S.H, Zaenuri, Adha, A. Windo Adenensi, S.H, Samsuddin, Qodar, Bambang, Ari, Fauzi yang selalu mendorong dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi dari awal hingga akhir sampai terselesainya skripsi.
10. Keluarga besar Kost Pondok Dara wabil khusus para Pejuang Skripsi: Nur Aminah, Merry Yusika Andani, Heni Masturoh, Tuti Angreni, Qur'aini

Safitri, Farissa, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.

11. Keluarga besar KKN 65 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan.

12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.



Bandar Lampung, 2019

Repi Susanti
1521020293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	18
3. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematisasi Hukum Islam.....	27
4. Pemekaran Desa dalam Islam.....	29
5. Ahl- al Hall waal-‘aqd	35
B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan	45
1. Peran	45

2. Tokoh Masyarakat	51
3. Pemekaran Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan	56

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pekon Suka Mulya Way Rantang.....	63
1. Sejarah Desa	63
2. Visi dan Misi Desa	65
3. Keadaan Geografis	66
4. Keadaan Demografis	68
B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa	72

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang	82
B. Pandangan Fiqh Siyasah tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Daftar Nama Kepala Desa Suka Mulya Way Rantang	64
2. Tabel 2 Batas Wilayah Pekon Suka Mulya Way Rantang	65
3. Tabel 3 Luas Wilayah Pekon Suka Mulya Way Rantang	66
4. Tabel 4 Keadaan Iklim Pekon Suka Mulya Way Rantang	66
5. Tabel 5 Mata Pencanharian Berdasarkan KK Pekon Suka Mulya Way Rantang.....	67
6. Tabel 6 Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang.....	68
7. Tabel 7 Jumlah KK Pekon Suka Mulya Way Rantang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
8. Tabel 8 Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang Berdasarkan Agama	69
9. Tabel 9 Sarana dan Prasarana Kesehatan Pekon Suka Mulya Way Rantang	70
10. Tabel 10 Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang Berdasarkan Etnis.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasaan Judul

Sebelum memasuki pokok pembahasan, penulis menganggap perlu menegaskan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul “**Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**” adapun istilah-istilah yang perlu diberi batasan dan penegasan dimaksud adalah:

1. **Analisis** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. **Fiqh Siyasah** yaitu usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam,² untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³
3. **Peran** menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan ataupun kejadian.⁴

¹P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka mandiri, 2006), h. 275.

²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 6.

³Ibnu Manzhur, *Lisan Al- ‘Arab*, jus 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108.

⁴Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 402.

4. **Tokoh** diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya).⁵ Sedangkan menurut J Laski, **Masyarakat** adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai keinginan bersama.⁶ Jadi tokoh masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, terpandang, dan di hormati oleh masyarakat yang selalu dijadikan rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat.
5. **Proses** adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.⁷
6. **Pemekaran** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus dan mulai timbul dan berkembang.⁸ **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Jadi pemekaran desa adalah pemecahan atau pemisah diri dari daerah induknya, kemudian membentuk daerah baru

⁵Donal A, Ramokoy. *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2010), h. 340.

⁶ Meriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 34.

⁷ www.wikipedia.com

⁸Tri Rahmawati, *Pemekaran Daerah Politik lokal dan Beberapa Isu terseleksi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 19.

⁹Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, Cv.Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 2.

baik Provinsi, Kabupaten dan Desa dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan istilah-istilah dari judul tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) adalah bagaimana peran tokoh masyarakat dalam proses pemekaran desa berdasarkan *fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Proses Pemekaran Desa, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif
 - a. Pemekaran daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 78 tahun 2007 tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Meskipun Undang-Undang mengaturnya, jika implementasi tidak dilakukan dengan baik, maka pemerataan kesejahteraan di tiap-tiap daerah di Indonesia tidak akan terealisasi sesuai dengan undang-undang.
 - b. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai acuan atau payung hukum yang jelas. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang memadai untuk dapat membahas dan menulis skripsi ini dengan baik dan relevan dengan disiplin keilmuan yang penulis tekuni di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Peran merupakan sesuatu yang melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, dan diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan tuntutan pada kedudukannya tersebut. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁰ Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh besar karena perannya yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat begitu dihormati di lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.¹¹

Kedudukan yang diperoleh tokoh masyarakat ini, bisa karena pengetahuannya, kebijaksanaan budi pekertinya, dan kesuksesannya dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kebijakan dan pengetahuan yang dimiliki tokoh masyarakat biasanya menjadi panutan bagi orang-orang yang

¹⁰W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.

¹¹Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol. h. 3.

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keberadaan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Karena itu tokoh masyarakat di dalam lingkungan masyarakat, sangat berperan penting dalam pemekaran desa.

Peran tokoh masyarakat dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah musyawarah sebagaimana terdapat dalam Pasal 80 ayat 2 dijelaskan bahwa musyawarah desa diikuti oleh pemerintah desa, badan musyawarah desa dan unsur masyarakat. Tokoh masyarakat itu sendiri masuk kedalam unsur masyarakat sebagaimana dijelaskan pada ayat 3 huruf C.¹²

Dalam hukum Islam musyawarah sering disebut dengan *majelis syura*. *Majelis syura* adalah sebuah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang merepresentatifkan kehendak umat sebagai rujukan khalifah.¹³ Abdul Hamid Al-Anshari menyebutkan bahwa *majelis syura* adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan publik.¹⁴

¹²Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 80, h. 161.

¹³An-Nabhani, Op. Cit., h.209.

¹⁴Abdul Hamid Al-Anshari, *Asy-Syura Wa Atsaruh fi Ad-Dimaqrathiyyah*, (kairo: As-Salafiyyah, 1990), h. 13.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam (Qs. Asy-Syura: 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.¹⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyerukan agar umat Islam mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan shalat fardu lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadapi masalah maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Rasulullah SAW sendiri mengajak para sahabatnya agar mereka bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah-masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Rasulullah SAW telah memberi kebebasan kepada umat islam agar mengatur sendiri urusan dunianya dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “kalian lebih mengetahui persoalan dunia kalian.” Dan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad “yang berkaitan dengan urusan agama kalian, maka kepadaku (rujukannya), dan yang berkaitan dengan urusan dunia kalian, maka kalian lebih mengetahuinya.”

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

¹⁵Departemen Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahan*, (bandung: Cv Diponegoro, 2005), h. 243.

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Pembentukan desa oleh Pemerintahan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2(dua) desa atau lebih. Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintahan desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan. rencana pemekaran desa dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pemekaran desa serta disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Pemekaran adalah merupakan konsekuensi logis terhadap penciptaan demokratisasi berpemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Desentralisasi tanpa disertai demokratisasi sama saja memindahkan sentralisasi dan korupsi dari pusat ke daerah/desa. Sebaliknya demokrasi tanpa desentralisasi sama saja merawat hubungan yang jauh antara pemerintahan dan rakyat.

¹⁶*Ibid*, h. 13.

Hal ini membuktikan bahwa pemekaraan perlu mendapatkan persetujuan ataupun kesepakatan dari tokoh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa, tokoh adat maupun warga. Di pekon suka mulya ini tokoh masyarakat dilibatkan dalam memberikan pandangan maupun dalam pengambilan keputusan. Karena tokoh masyarakat sendirilah yang mengetahui letak tanah ulayat serta batas-batas setiap desa yang ada. Sehingga secara sistem pemerintahan adat, ini sangat memperhatikan nilai-nilai adat maupun norma-norma yang ada dan hidup dikehidupam masyarakat adat di pekon suka mulya.

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Poses Pemekaran Desa (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah:

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong?

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya.
- b. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna:

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang Ilmu Hukum Tata Negara.
- 2) Untuk memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, agar lebih baik dari sebelumnya.

- b. Kegunaan secara praktis yaitu:

- 1) Untuk memperluas pengetahuan penulis.
- 2) Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di lapangan atau pada

responden.¹⁷ Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²⁰ Dalam hal ini data primer diperoleh dari tokoh masyarakat setempat yang lokasi penelitian yakni di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dengan melakukan interview kepada para tokoh masyarakat setempat.

¹⁷Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan lampung, 2005), h. 21.

¹⁸Ibid, h. 10.

¹⁹Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 43.

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bahannya di dapat dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur buku-buku, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian.²¹

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah semua yang dijadikan objek pendukung bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²² Populasi dalam penelitian ini adalah semua tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan obyek penelitian.²³ Karena sampelnya hanya berjumlah lima belas orang, maka menurut Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Teknik sampel yang digunakan adalah *purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁴ *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri

²¹Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

²²Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R&D*, (Bandung:Al-Fabeta, 2010), h. 80.

²³Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara), h. 102.

²⁴*Ibid*, h. 209

oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala desa, perangkat desa (2 orang), tokoh adat (4 orang), tokoh agama (2 orang), tokoh pemuda (2 orang), dan masyarakat (4 orang), maka sampel dalam populasi ini berjumlah 15 (lima belas) orang yang dilakukan di pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh data mengenai suatu masalah dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau di rekam.²⁶

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa dengan mencatat data-data atau

²⁵Suharsimi Arkunto, *Ibid*, h. 155.

²⁶Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), h. 129.

untuk menjawab pertanyaan peneliti. Observasi dilakukan di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.²⁷

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara. Foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.²⁸

5. Metode pengolahan Data

Apabila data telah terkumpul, maka akan dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. *Sistematic* adalah melakukan pengecekan data/bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan, dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. *Editing* adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurai kesalahan maupun kekurangan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan, keseragaman satuan data sudah benar atau relevan dengan data penelitian lapangan ataupun dari literature.²⁹

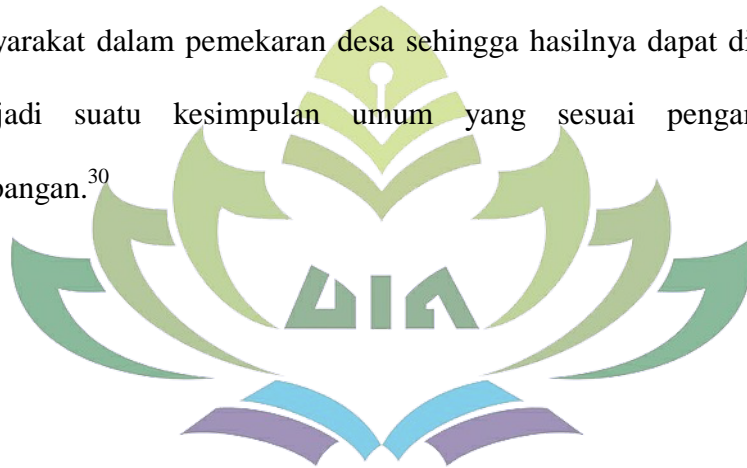
²⁷Soeratno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), h. 99.

²⁸Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010),h. 216.

²⁹Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), h. 56.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah semua terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai pengamatan peneliti lapangan.³⁰



³⁰Hadi Sutisno, *Metode Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), H. 47.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³¹

Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang di pakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.³²

³¹Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

³²Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 21.

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³³

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³⁴ Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu

³³ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), h. 45.

³⁴ *Ibid*, h. 109.

negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari'ah, tidak diperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan

³⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- 1) Siyasah Dusturiyah;
- 2) Siyasah Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*);
- 3) Peradilan (*Siyasah qadha'iyah*);
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*);
- 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

b. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan (*siyasah qadha'iyah*);
- 2) Negara (*siyasah 'idariyyah*);
- 3) Moneter dan ekonomi (*siyasah maliyyah*);
- 4) Serta hubungan internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*).

c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan;

- 2) Hubungan internasional;
 - 3) Dan keuangan Negara.
- d. Menurut T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:
- 1) Politik pembuatan perundang-undangan;
 - 2) Politik hukum;
 - 3) Politik peradilan;
 - 4) Politik moneter/ekonomi;
 - 5) Politik administrasi;
 - 6) Politik hubungan internasional;
 - 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan;
 - 8) Politik peperangan.³⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.

- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁷

Dari ruang lingkup diatas maka yang berkaitan dengan judul adalah ruang lingkup siyasah dusturiyah kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (konstitusi).³⁸

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini

³⁷ *Ibid*, h. 15.

³⁸ [Http://Rangerwhite09-Artikel .Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang konsep. Html](http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-konsep.Html), (05 Juni 2018).

juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.³⁹

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.⁴⁰

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang di sebut dengan *fiqh*.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*H.77.

⁴⁰ [Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/2013/06/Ruang-Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html](http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/2013/06/Ruang-Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html) (6 Juni 2018).

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.⁴¹ Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 53.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.

Fiqh siyasah dusturiyah sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber

penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

3. *Pembagian Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'yyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴²

⁴²<https://www.suduthukum.com/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (14 oktober 2018)

4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

a) Al-qur'an

Al-quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *siyasah dusturiyah* ialah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁴³

b) Sunah

Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat

⁴³ Q.S An-Nisa 29:4.

yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Kaitannya tentang Desa seperti seperti hadis berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ مُخْذَرِيًّا

Artinya: Apabila ada tiga orang yg keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. Abu Daud No.2241).

c) *Ijma (consensus)*

Dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal.⁴⁴

d) *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk

⁴⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

prilaku yang satu dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁴⁵ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

3. Kedudukan *Fiqh Siyasah* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

- a. *Fiqh Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).⁴⁶

T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan

⁴⁵Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

⁴⁶*Ibid*, h. 9.

keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (adab).⁴⁷

Dari berrbagai definisis diatas maka dapat ditarik bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *siyasah*.⁴⁸

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak *responsif* terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan

⁴⁷*Ibid*, h. 10.

⁴⁸*Ibid*, h. 12.

menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Disinilah peran penting *fiqh siyasah*.

Disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.⁴⁹

4. Pemekaran Desa dalam Islam

Pemekaran wilayah atau perluasan wilayah (*Ekspansi*) menurut Zainul Bahir bahwa *ekspansi* yaitu memperluas negara sendiri atau daerah sendiri dengan jalan menduduki wilayah negara lain.

- a. Pemekaran atau perluasan wilayah dalam Islam yaitu pada masa Khalifah Rasyidin yang mana pada masa Umar Ibn Al Khathab yang paling menonjol dalam perluasan wilayah. Setelah dilantik menjadi kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip, Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar. Namun karena permasalahan

⁴⁹*Ibid*, h. 13.

yang di hadapi umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam, umar melakukan berbagai kebijaksanaan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya. Kebijaksanaan yang dilakukan umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara reguler yang digaji oleh negara.⁵⁰

Selama sepuluh tahun pemerintahan umar (634-644 M), kekuasaan Islam telah melebarkan sayapnya melampaui Jazirah Arabia. Penaklukan demi penaklukan dilakukan pada masa Umar. Bahkan dua adidaya ketika itu, Persia dan Bizantium berhasil jatuh ketangan umat islam.

Pada 635 M, tentara Islam di bawah pimpinan Khalid ibn Walid berhasil menaklukan Damaskus. Setahun kemudian setelah tentara Bizantium mengalami kekalahan, pada perang Yarmuk, praktis seluruh wilayah Syria berhasil dikuasai oleh umat Islam pada tahun 637. Di bawah pimpinan panglima perang Sa'd ibn Abi Waqqas, Irak berhasil pula dikuasai setelah berkecamuknya perang di Qadisiah. Seluruh Irak praktis berada dalam kekuasaan Islam menjelang khalifah Umar wafat. Pada tahun 639 M, dibawah komando 'Amr ibn al-'Ash, mesir berhasil pula di kuasai. Setahun kemudian, tentara Islam berhasil pula menghancurkan Imperium Persia. Pada tahun berikutnya, 641 M, Palestina yang dikuasai Bizantium jatuh ke tangan Islam. Kota Yerusalem yang di dalamnya terletak Baitul Maqdis merupakan yang

⁵⁰*Ibid*, h. 63.

terakhir jatuh ketangan Islam secara damai. Adalah Umar sendiri yang datang ke sana untuk menandatangani perjanjian damai tersebut.⁵¹

b. Selanjutnya perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah

Dalam perluasan wilayah, Muawiyah, dan dinasti Bani Umayyah umumnya melakukan berbagai penaklukan. Setidaknya, ekspansi dinasti ini meliputi tiga front, yaitu front pertempuran menghadapi bangsa Romawi di Asia kecil, Konstantinopel dan pulau-pulau di laut Tengah, front Afrika Utara dari selat Gibraltar hingga Spanyol, dan front timur hingga Sindus, India. Hingga akhir Bani Umayyah pada 700 M, kekuasaan Islam sudah mencapai lautan atlantik di barat dan lembah Indus di timur. Selain perluasan, Bani Umayyah juga melakukan berbagai penyempurnaan di bidang administrasi negara (birokrasi), perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi negara, untuk pertama kalinya Muawiyah memperkenalkan lembaga pengawal pribadi (hajib) dalam sistem pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas-tugas protokoler khalifah dalam menentukan dan menerima siapa yang berhak bertemu dengan khalifah. Selain pengalaman tragedi Ali yang tewas terbunuh, Muawiyah juga mendapat inspirasi perlembagaan Hajib ini dari pengaruh Syam dan Persia.⁵²

c. Perluasan atau ekspansi kekuasaan Islam pada masa Bani Abbas

Pada masa dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah, antara lain Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran (Persia), Yordania,

⁵¹ Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2000), h. 50.

⁵² *Ibid*, h. 50.

Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Al Jazair, Maroko, Spanyol, Afganistan dan Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina dan juga India.

d. Perluasan wilayah pada masa Turki Usmani

Bangsa Turki Usmani adalah tipe pejuang dan prajurit yang tangguh sepanjang perjalanan dinasti ini, penaklukan demi penaklukan terus dilakukan. Selama 6 abad lebih kekuasaannya, Usmani berhasil mengembangkan kekuasaannya ketiga benua, yaitu Asia, eropa, dan Afrika. Di Asia, luas wilayah Usmani meliputi Asia kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman. Di Eropa, Usmani berhasil menguasai Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, dan Rumania. Sementara di Afrika, Usmani mengembangkan sayapnya hingga Libia, Mesir, Tunisia, dan Aljazair.⁵³

Ketua rukun warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya adalah bagian dari BPD (badan permusyawaratan desa). Anggota BPD adalah wakil penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.⁵⁴

Di dalam *fiqh siyasah* kedudukan anggota BPD sama dengan lembaga *Ahl al-Hall wa al-Aqdi*. Para *ahl siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁵⁵

⁵³*Ibid.* h. 51.

⁵⁴Hanif Nurkholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2001), h. 78.

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h.158.

Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Al-mawardi menyebutkan *ahl al-hall wa al-aqdi* dengan *ahl al-ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *ahl al-syawkah*. Sebagian lagi menyebutkan dengan *ahl al-syura* atau *ahl al ijma*. Sementara *al-Baghdadi* menamakan mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”. Sejalan dengan pengertian ini, Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis syura yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan dan kemaslahtan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah yang empat, khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan Negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah ia meninggal. Memang pada masa ini *ahl al*

syura atau *ahl al-hall wa al-aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.

Kata “Syura” (*syura*) berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan pengertian ini, kata syura atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Al-quran menggunakan kata syura dalam tiga ayat yaitu:

1) Surat Al- Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya” Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan

*kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁶

5. Ahl- al Hall waal-‘aqd

a. Definisi dan Sejarah Ahl- al Hall waal-‘aqd

Istilah ahlul halli wa aqdi berasal dari tiga suku kata, yaitu ahlul, hallun, dan aqdun. Kata alif ha lam berarti ahli atau famili atau keluarga sedangkan kata ha la berarti membuka atau menguraikan, sementara kata ain ko da memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat dirangkai menjadi satu kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁵⁷ Bibit konsep ahlul halli wa aqdi pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khatab. Khalifah Umar bin Khatab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqas, Abdu Al Rahman bin Auf, Zubair bin Al- Awwam, Dan Thalhah bin Ubaidillah Dan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.⁵⁸

Istilah *Ahlul Halli Wa Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani

⁵⁶Q.S Al-Baqarah 233:2.

⁵⁷Suyuti J Pulungan, Op, Cit, h. 66.

⁵⁸Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 28.

mereka. *Ahlul Halli Wa Aqdi* terdiri para ulama, para pemimpin suku dan pemuka masyarakat yang menguatkan mereka sebagai lembaga legislatif. Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlul Halli Wa Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqh di klaim sebagai *Ahlul Halli Wa Aqdi* yang bertindak sebagai umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat. *Ahlul Halli Wa Aqdi* adalah orang yang berkecimbunglunsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵⁹

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, ulil amri adalah *Ahlul Halli Wa Aqdi* ia menyatakan: “kumpulan ulil amri dan mereka yang disebut *Ahlul Halli Wa Aqdi* adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, petani, tukang, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al- Razi juga menyamakan pengertian antar *Ahlul Halli Wa Aqdi* dengan ulil amri, yaitu para

⁵⁹ Suyuti J Pulungan, Op, Cit, h. 66-77.

pemimpin dan pengusaha. Demikian juga Al-Maraghi yang sependapat dengan apa yang diungkapkan Rasyid Ridha.⁶⁰

Dengan demikian, *Ahlul Halli Wa Aqdi* dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang diberi kewenangan untuk memilih seseorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul Halli Wa Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga Legislatif) sebagai refresentasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasai rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Hadist, maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai dengan hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, dia mempunyai orang-orang khusus dari pada ulil amri yang disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁶¹

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khatab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yng dibuat pada masa

⁶⁰ Ibid, h. 69.

⁶¹ Farid Abdul Kholid, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah), h. 78-79.

pemerintahannya di proses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sudang umum, yang diundang bersidang bila negara menghadapi bahaya. Sedang yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya dipatuhi.⁶²

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan sahabat-sahabat cendekiawan untuk mendengarkan pendapat mereka yang terbaik.

Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah dan Syiria.⁶³ Setelah Umar wafat, lembaga syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin al-Khattab.

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di kemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan musyawarah namun pengangkatan Ali

⁶² *Ibid*, h. 83.

⁶³ Sayuti Pulungan, *Op.Cit*, h. 124-125.

dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya. Namun dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.⁶⁴

Paradigma pemikiran ulama *fiqh* merumuskan istilah *Ahlul Halli Wal Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama *fiqh* diklaim sebagai *Ahlul Halli Wal Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.

Dengan demikian *Ahlul Halli Wal Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul Halli Wal Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan.

Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan *Ahlul Halli Wal Aqdi* dapat menentukan siapa diantara *Ahl Al-Imamat* yang pantas menjadi kepala negara

⁶⁴ *Ibid*, h. 150

menurut syarat-syarat yang ditentukan dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.⁶⁵

b. Dasar Ahlul Halli Wa Aqdi

Bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul Halli Wa Aqdi* atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam *fiqh* kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam Al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan “*ulil amri*”. Amanah dalam konteks pemimpin dapat diartikan sebagai bertanggungjawab atau suatu pelimpahan kewenangan karena kekuasaan tersebut merupakan nikmat SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh sunnah Rasulullah. Kekuasaan tersebut kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.⁶⁶

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat (59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

⁶⁵ Ibid, h. 69-70

⁶⁶ Zuhraeni, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Al-'Adalah* vol 12 No1 2014 (bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 174 (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182> (13 Juli 2019) dapat di pertanggung jawabka secara ilmiah.

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa/4:59).

Juga dalam Firman-Nya:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya: "... dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). ”⁶⁷

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-Nya:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

Dengan demikian, ia juga telah menetapkan satu prinsip “sesuai dengan undang-undang” dalam komunitas politik, salah satu prinsip terpenting yang ditetapkan oleh Islam dibidang konstitusional politik, yang belakangan ini dikenal oleh ilmu politik barat dan membuat beberapa gambaran penerapannya.⁶⁸

⁶⁷Qs. Ali- Imran (3): 104.

⁶⁸Ibid, h. 82.

c. Syarat-Syarat *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Ahl al-Hall wa al-'Aqd terdefiniskan dan teridentifikasi berdasarkan sifat-sifat atau syarat-syarat yang harus mereka penuhi, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi ada tiga berikut ini:

1. Al-Adalah yang memenuhi syarat-syaratnya adalah sebuah talenta yang mendorong pemiliknya untuk selalu komitmen pada ketaqwaan. Adapun yang dimaksudkan dengan ketaqwaan adalah menjalankan perintah-perintah syara' dan menjauhi larangan-larangannya.
2. Memiliki ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa orang yang berhak menjabat *imamah* berdasarkan syarat-syarat menjadi *imamah* yang diperhitungkan.
3. Pandangan dan kebijaksanaan yang bisa menjadikan pemiliknya mampu menyeleksi dan memilih siapakah yang paling layak menjabat *imamah* dalam mengurus dan mengelola kemaslahatan-kemaslahatan.⁶⁹

Al-Mawardi tidak memberikan pendapatnya sendiri berapa jumlah anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* yang ideal untuk menjalankan tugasnya. Al-Mawardi juga tidak menjelaskan *Ahlul Halli wal Aqdi* ini terbentuk, bagaimana proses rekrutmennya. Namun apabila kita melihat pada tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, maka *Ahlul Halli wal Aqdi* anggotanya dipilih atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah anggota enam orang serta dalam keanggotaannya terdapat anggota yang bertindak sebagai pihak yang

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Ihsan, 2011), h. 299.

independen, hanya sebagai penasehat dan tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

d. Tugas dan Wewenang *Ahlul Halli wal Aqdi*

Para ulama ushul *fiqh* menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah SWT.⁷⁰

Dari uraian para ulama tentang *Ahlul Halli wal Aqdi* ini tampak hak-hak sebagai berikut:

1. *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiaat imam.
2. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

⁷⁰ Farid Abdul Khaliq, Op, Cit, h. 80.

3. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengingat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. *Ahlul Halli wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
5. *Ahlul Halli wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang Nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang Nomor 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang Nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.⁷¹

Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahlul Halli wal Aqdi* terbatas pada dua hal, yaitu:

1. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
2. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Selain dua hal di atas, lembaga *Ahlul Halli wal Aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah.⁷²

B. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Peran

a) Pengertian Peran

⁷¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 118.

⁷² Muhammad Iqbal Dan Amien Husein Nasution, *Pemikir Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 184-185.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁷³ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁷⁴

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.⁷⁵ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan

⁷³ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 735.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 213.

⁷⁵ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 5 februari 2019.

menjalankan peran apabila ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial yang terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁷⁶

Menurut Veitzal Rivai peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu.⁷⁷ Menurut Ali peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak. Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini didasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

Menurut Hendro Puspito peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang. Jadi yang dimaksud peran adalah tugas-tugas ataupun upaya yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi fungsi yang diembannya.⁷⁸

⁷⁶Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). h. 7.

⁷⁷ Veithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi1, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h. 393.

⁷⁸Puspito Hendro, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta:Yayasan Kanisius,1997). h. 76.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dalam lingkungan tersebut.

b) Macam-Macam dan Fungsi Peran

1. Macam-macam peran

Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi 3 macam hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, sebuah peran di sini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat.

2. Fungsi Peran

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto terdapat fungsi peran dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yaitu:

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
- b. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- c. Menghidupkan sistem pengendali control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

d. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan.⁷⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon mengatakan bahwa tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku adalah termasuk dari bagian Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.⁸⁰

3. Ciri- Ciri Peran dan Jenis-Jenis Peran

a. Ciri- Ciri Peran

Peran memiliki karakteristik sebagai bentuk penilaian terhadap suatu peran yang terjadi. Anderson Carten menyebutkan bahwa ciri-ciri peran yaitu:

- 1) Terorganisasi atau adanya interaksi.
- 2) Terdapat perbedaan dan kekhususan.
- 3) Selain itu adanya keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.⁸¹

b. Jenis-jenis peran

Adapun jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi atas tiga macam yaitu:

- 1) Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.

⁷⁹*Ibid*, h. 46

⁸⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon.

⁸¹ Sarlita Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

- 2) Peran partisipasif diartikan sebagai peran yang dilakukakan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- 3) Peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.⁸²

Menurut Cohen terdapat jenis-jenis peran yaitu:

- 1) Peran nyata adalah suatu cara yang betul-betul akan dijalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.
- 2) Kegagalan peran adalah jenis peran yang dijalankan dengan terjadinya suatu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- 3) Model peran adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- 4) Rangkaian atau lingkup peran adalah suatu hubungan individu dengan individu saat menjalankan suatu peran.
- 5) Ketegangan peran adalah suatu kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami sedang kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peran yang dianjurkan adalah jenis peran yang diharapkan masyarakat dari kita yang berfungsi untuk menjalankan peran tertentu.

⁸²*Ibid*, h. 46.

- 7) Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang memiliki kedudukan suatu status atau lebih yang dapat menuntun adanya harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
- 8) Kesenjangan peran adalah suatu jenis pelaksanaan peran yang dilakukan secara emosional.⁸³

Menurut Narwoko dan Suyanto membagi jenis-jenis peran berdasarkan pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Peran yang diharapkan adalah suatu peran seorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Contoh jenis peran ini adalah hakim, diplomatik, bupati dan lainnya.
- 2) Peranan yang disesuaikan adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu. Contoh jenis peran ini adalah iman dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya.

Cara memperoleh peran menurut Narwoko dan Suyanto terdapat dua jenis yaitu:

- 1) Peran bawaan diartikan sebagai peran yang di dapat secara otomatis bukan karena usaha. Contohnya peran nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.
- 2) Peran pilihan diartikan sebagai peran yang di dapatkan atas keputusannya sendiri, seperti seseorang yang memilih Fakultas Dakwah.⁸⁴

2. Tokoh Masyarakat

a) Pengertian Tokoh Masyarakat

⁸³ Cohen, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 215.

⁸⁴ Dwi Narwoko, Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 14.

Di dalam kehidupan masyarakat, tokoh masyarakat menduduki posisi yang penting, oleh karena ia dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Sehingga segala tindak-tanduknya merupakan pola aturan yang patut diteladani oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat tersebut.⁸⁵ Tokoh masyarakat dalam kamus politik dan hukum, tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpandang, dan dihormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya).⁸⁶ Sedangkan menurut J Laski, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan bersama.⁸⁷

Menurut Subakti, bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan negara. Pengertian tokoh masyarakat adalah orang yang memberi pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang keprotokolan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.⁸⁸

Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁸⁵ Ibid., h. 40

⁸⁶ Donal A, Ramokoy. *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). h. 340.

⁸⁷ Meriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). h. 34.

⁸⁸ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 tentang Protocol. h. 2.

bahwa tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.⁸⁹

b) Ciri-ciri tokoh masyarakat

Menurut pandangan Marion Levy, tokoh masyarakat pada umumnya mempunyai ciri- ciri dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seseorang anggotanya
2. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
3. Adanya sistem tindakan utama yang merupakan swasembada.
4. Kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama.⁹⁰

Menurut Abdillah Hanafi dalam Koentjaraningrat (1983:113) tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. memiliki hubungan sosial lebih luas dari pada para pengikutnya.
- b. memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya.
- c. tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Tokoh Masyarakat Formal

Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti:

a. Camat

⁸⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 39 Ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. H. 22.

⁹⁰ Marion Levy, Pengertian Masyarakat Menurut Definisi Para Ahli (Online), Tersedia Di: <http://Genggamintecrnet.Com/Pengertian-Masyarakat-Menurut-Definisi-Para-Ahli.Html>. (8februari 2019)

- b. Kepala Desa/ Lurah
- c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya.

2) Tokoh Masyarakat Informal

Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu:

- a. tokoh agama
- b. tokoh adat
- c. tokoh perempuan
- d. tokoh pemuda, dan lain-lain.

c) Kedudukan tokoh masyarakat

Untuk memahami dengan baik, kedudukan yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

- 1) Kiprahnya dimasyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya, dengan ketokohnya itu maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting dimasyarakat mulai dari masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar seperti NU, Muhammadiyah. Termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh bergerak dan lain-lainnya.
- 2) Memiliki kedudukan formal diperintahan seperti lurah/wakil lurah, camat/wakil camat, walikota/wakil walikota, gubernur/wakil gubernur, dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan atau bersama

masyarakat yang dipimpinnya ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti dan diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal seperti ini pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat

- 3) Mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintah dari tingkat paling bawah sampai keatas selalu meminta pandangan dari nasehat kepadanya karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat.
- 4) Ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berintegrasi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak, ketua partai seperti ini dapat disebut tokoh masyarakat.
- 5) Usahawan atau pengusaha yang rendah hati, suka berzakat, berlimpah dan bersedekah, peduli kepada masyarakat, serta bersilaturahmi pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

Jadi pada hakikatnya setiap orang adalah pemimpin. Tokoh masyarakat dilingkungan masing-masing adalah pemimpin bagi kaumnya, seperti dimasa Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk memimpin kaumnya. Bedanya kalau Nabi dan Rasul dipilih dan diutus langsung oleh Tuhan untuk memimpin kaum yang tersesat, akan tetapi tokoh masyarakat seperti ketua RT dan Ketua Rw dipilih langsung oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing dan menolong mereka

terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyatnya.⁹¹

d) Tugas dan fungsi tokoh masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan “Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pekon”. Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat *Pekon* dalam setiap rencana yang diajukan Peratin sebelum dijadikan Keputusan *Pekon*.

Lembaga Himpun Pemekonan berfungsi :

1. Menganyomi yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di *Pekon* yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan *Pekon* bersama-sama Pemerintah *Pekon*.
3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan *Pekon*, Anggaran Pendapatan dan Belanja *Pekon* serta Keputusan Peratin.
4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.⁹²

⁹¹ Musni Munar, *Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Rakyat dan Pembangunan*, Musnimunar.Wordpres.Com. Diposting 12 Juni 2013 Di Akses Pada Februari 2019.

3. Pemekaran Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

a. Pemekaran Desa Menurut Undang-Undang

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat Provinsi maupun Kota dan Kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁹³

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf a berupa: pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk

⁹² peraturan daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 Tentang Pembentukan lembaga himpun pemekonan.

⁹³ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia diakses tanggal 29 januari 2019.

menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding 20 dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah di harapkan dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah dilakukan untuk mecapai tujuan yang menguntungkan wilayah itu sendiri yang termuat dalam asas sosial dan ekonomi dimana usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Penataan wilayah dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan merupakan upaya untuk menata atau mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Konsep penataan wilayah pemekaran, penggabungan dan *regrouping* kecamatan atau desa dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan pemaparan di atas peneliti berkesimpulan bahwa pemekaran adalah pemisahan atau penggabungan suatu daerah yang kemudian dijadikan daerah baru dan akan memiliki pemerintahan dan struktur baru.

Mekanisme pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- 2) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada Kepala Desa;

- 3) Kepala Desa bersama unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang lain mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan Desa;
- 4) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD, disertai Berita Acara Hasil Rapat dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- 5) BPD mengadakan rapat untuk membahas usul kepala desa tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan Pembentukan Desa;
- 6) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat, rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk dan keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan desa;
- 7) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- 8) Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- 9) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;

10) Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.

b. Pemekaran Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Kententuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Adapun yang menjadi tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- 2) Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- 3) BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- 4) Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- 5) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- 6) Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- 7) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- 8) Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- 9) DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- 10) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- 11) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- 13) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Proses pembentukan daerah sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3039), dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada tiga persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh pemerintahan daerah. Persyaratan secara teknis disarakan pada factor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pekon Suka Mulya Way Rantang

1. Sejarah Desa

Kabupaten Pesisir Barat merupakan sebuah kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Lampung Barat, yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012⁹⁴ kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari sebelas kecamatan yaitu kecamatan Bengkunt Belimbing, Bengkunt, Ngambur, Pesisir Selatan, Krui Selatan, Pesisir Tengah, Way Krui, Karya Penggawa, Pesisir Utara, Lemong, dan Pulau Pisang.⁹⁵

Kecamatan Lemong adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Barat yang sebelah Utara berbatasan dengan Nasal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pesisir Barat. Sebelah barat berbatasan dengan laut Samudra Hindia. Dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Lemong terdiri dari tiga belas desa atau pekon yaitu Penengahan, Bandar Pugung, Bambang, Pagar Dalam, Malaya, Merangka, Suka Mulya Way Rantang, Lemong, Rata Agung, Parda Haga, Way Batang, Tanjung Sakti, dan Tanjung Jati.

Pekon Suka Mulya Way Rantang merupakan salah satu pekon yang berada di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Yang disahkan melalui SK Bupati

⁹⁴ <http://www.lampungprov.go.id>. Diakses tanggal 14 mei 2019.

⁹⁵ Karyaaliimron.blogspot.co.id. diakses tanggal 14 mei 2019.

Lampung Barat Erwin Nizar T pada tanggal 28 Desember 2006. Pada tanggal 24 September 2006 diajukan kepada Bupati dan diresmikan pekon persiapan Suka Mulya, dan pada tanggal 28 Desember 2006 dibuat *pekon* definitif dengan PJ peratin pada saat itu M. Dawiri.

Pekon Suka Mulya merupakan pemecahan dari dua *pekon* yang terdiri dari *Pekon* Cahaya Negeri (Merangka) yang meliputi Pemangku Way Rantang dan Pemangku Simpang Lunik dan *Pekon* Melaya yang meliputi Pemangku Nusa Damay (Kekabu) dan Pemangku Suka Maju Lintik.

Sesuai wawancara dengan bapak Sahroni selaku sekretaris pemekaran desa pada masa itu mengatakan bahwa pemberian nama pada pekon ini tidak ada cerita zaman dahulu hanya saja asal pemberian nama Suka Mulya Way Rantang yaitu, Suka Mulya adalah keinginan yang mulia dari masyarakat setempat, sedangkan Way Rantang adalah nama pekon pertama sebelum adanya pemekaran dari pekon induknya. Sehingga nama pekon ini digabungkan menjadi pekon Suka Mulya Way Rantang.⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Sahroni Selaku Sekretaris Pemekaran Pekon Suka Mulya Way Rantang. Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 09:30 Wib, di Kantor Desa Suka Mulya.

Adapun nama dari pada kepala desa yang pernah menjabat dari tahun 2006 sampai saat ini tahun 2019 yaitu:

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Pekon Suka Mulya Way Rantang

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1.	M. Dawiri	2006 – 2010
2.	Fikri Hidayah	2011 – 2015
3.	Solikun	2016 – 2020

Sumber: Profil Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

2. Visi dan Misi Desa

a. Visi Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong

Visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah perusahaan, instansi, atau organisasi. Pandangan mengenai mau dibawa kearah mana manajemen tersebut, agar bisa membangun kesuksesan, maka perlu ada arah jelas mengenai laju perusahaan atau instansi. Adapun Visi Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat yaitu: “terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan dengan menguatkan sector pertanian, perkebunan, infrastruktur, dan pariwisata serta kebersamaan dalam membangun demi pekon suka mulya way rantang yang lebih maju”.⁹⁷

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Solikun Selaku Kepala Desa Pekon Suka Mulya Way Rantang. Tanggal 14 Februari 2019, Pukul 10:30 Wib, di Kantor Desa Suka Mulya.

b. Misi Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong

Misi Adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong di atas, maka misi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian.
- 2) Mewujudkan infrastruktur yang baik, kemandirian dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Pekon Suka Mulya Way Rantang.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia.⁹⁸

3. Keadaan Geografis

Keadaan geografis adalah salah satu gambaran dari lingkungan sekitar desa maupun hasil antara adaptasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Keadaan geografis meliputi batas-batas, luas wilayah letak administrasi dan keadaan iklim.

Adapun batas-batas Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat berbatasan langsung dengan:

Tabel 2
Batas Wilayah Pekon Suka Mulya Way Rantang

Batas	Pekon
Sebelah utara	TNBBS
Sebelah selatan	Cahaya Negeri
Sebelah timur	Malaya
Sebelah barat	Lemong

⁹⁸Dokumentasi pekon suka mulya way rantang kecamatan lemong tahun 2017.

Tabel 3
Luas Wilayah Pekon Suka Mulya Way Rantang

Nama wilayah	Luas (Ha)
1. Luas Pemukiman	50
2. Luas Persawahan	2
3. Luas Perkebunan	2940
4. Luas Kuburan	3
5. Luas Pekarangan	40
6. Sarana Dan Prasarana Umum	7

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

Pada tingkat luas wilayah Pekon Suka Mulya Way Rantang di mayoritas oleh lahan perkebunan karena banyaknya mata pencaharian masyarakat dalam berkebun.

Tabel 4
Keadaan Iklim Pekon Suka Mulya Way Rantang

Curah hujan	48	Mm
Jumlah bulan hujan	7	Bulan
Kelembapan	-	-
Suhu rata-rata harian	32	⁰ C
Tinggi tempat dari permukaan laut	1500	Mdl

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

Keadaan iklim di Pekon Suka Mulya Way Rantang dikatakan normal seperti yang kita lihat dalam tabel diatas.⁹⁹

⁹⁹Dokumentasi pekon suka mulya way rantang kecamatan lemong tahun 2017.

4. Keadaan Demografis

a. Jumlah Mata Pencarian berdasarkan KK di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong

Apabila dilihat dari keadaan pekon suka mulya way rantang dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pekon Suka Mulya Way Rantang memiliki macam pekerjaan. Mulai dari yang sebagai petani, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Mata Pencarian berdasarkan KK di Pekon Suka Mulya Way Rantang

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	320	180
2. Buruhtani	112	34
3. Peternak	5	-
4. Wiraswasta	-	-

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas tampak mayoritas mata pencarian keluarga di Pekon Suka Mulya Way Rantang adalah petani yang berjumlah 500.¹⁰⁰

b. Jumlah Penduduk di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong

Jumlah penduduk di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat tampak pada tabel berikut ini:

¹⁰⁰Dokumentasi pekon suka mulya way rantang kecamatan lemong tahun 2017.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang

Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
450 orang	377 orang	243 orang

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

c. Jumlah KK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi perkembangan kehidupan manusia untuk kearah yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan yang ada di Pekon Suka Mulya Way Rantang, baik yang belum sekolah atau tidak tamat SD, tamatan sekolah menengah pertama hingga keperguruan tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Jumlah KK Pekon Suka Mulya Way Rantang berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tamatan SD atau sederajat	348
Tamatan SMP atau sederajat	86
Tamatan SMA atau sederajat	59
Tamatan S1 atau sederajat	1
Buta Huruf	17

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

Berdasarkan tabel di atas tampak mayoritas pendidikan pekon Suka Mulya Way Rantang adalah tamat SD yang berjumlah 348. Hal ini berarti tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan di pekon suka mulya way rantang masih

rendah. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan agar lebih baik diperlukan upaya peningkatan semangat kepada anak-anak Pekon Suka Mulya Way Rantang untuk belajar, sebab anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan dengan memiliki pendidikan yang tinggi bisa membuat Pekon Suka Mulya Way Rantang menjadi lebih maju dan makmur.¹⁰¹

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Keyakinan beragama di Pekon Suka Mulya Way Rantang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	827
Kristen	-
Katholik	-
Hindu	-
Budha	-

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat pekon Suka Mulya Way Rantang seluruhnya beragama Islam.¹⁰²

¹⁰¹Dokumentasi pekon suka mulya way rantang kecamatan lemong tahun 2017.

¹⁰²Dokumentasi pekon suka mulya way rantang kecamatan lemong tahun 2017.

**e. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Pekon Suka Mulya Way Rantang
Kecamatan Lemong**

Sarana dan prasarana kesehatan dipekon Suka Mulya Way Rantang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 9
Sarana dan Prasarana Kesehatan Pekon Suka Mulya Way Rantang

Prasarana	Jumlah	Keadaan
Posyandu	2	Aktip

Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Jumlah etnis yang ada dipekon Suka Mulya Way Rantang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 10
Jumlah Penduduk Pekon Suka Mulya Way Rantang Berdasarkan Etnis

No	Etnis	Jumlah Jiwa
1	Lampung	414
2	Jawa	312
3	Sunda	101

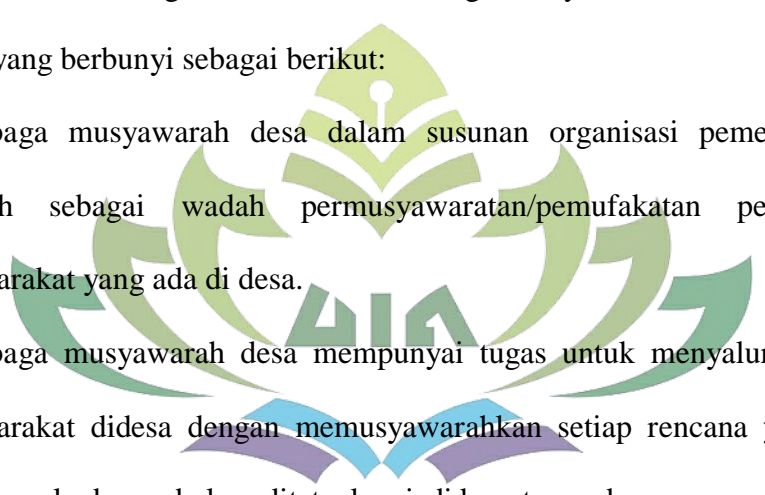
Sumber: Kantor Pekon Suka Mulya Way Rantang Tahun 2017.

Berdasarkan tabel diatas jelas data disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Pekon Suka Mulya Way Rantang lebih banyak suku lampung.

B. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemekaraan Desa

Tokoh masyarakat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa. Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Peran tokoh masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

- 
- ii. Lembaga musyawarah desa dalam susunan organisasi pemerintahan desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/pemufakatan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa.
 - iii. Lembaga musyawarah desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan jadi keputusan desa.
 - iv. Untuk menjalankan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2), lembaga musyawarah desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan musyawarah mufakat dalam rangka penyusunan keputusan desa.¹⁰³

Membahas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dilibatkannya para batin yang ada didalam wilayah pemekaran tersebut, baik dalam meminta

¹⁰³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ,pasal 5.

pandangan ataupun dalam meminta pendapat sebagai orang yang tahu tentang tanah ulayat dan batas wilayah desa. Terkait dengan rencana pemekaran desa mendukung sepenuhnya karena melihat adanya kesenjangan yang dirasakan masyarakat terkait dengan dana desa yang diberikan desa induknya serta tertinggalnya pembangunan infrastruktur di pekon ini.¹⁰⁴

Pemekaran desa seharusnya terjadi apabila prosedur dan tata cara pemekaran dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang sudah mengaturnya, yang mengatakan harus dilaksanakan musyawarah antara kepala desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat setempat untuk mengambil keputusan di dalam masyarakat setempat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Sebelum adanya pemekaran desa dilakukan musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat sendiri dalam perencanaan pengambilan keputusan terkait dengan kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat serta mendukung sepenuhnya dengan rencana itu agar masyarakat bisa merasakan pelayanan desa yang lebih baik.¹⁰⁵

Pembentukan suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Persyaratan administratif untuk desa adanya persetujuan persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Desa dengan melakukan kajian Desa terhadap rencana pembentukan Desa. Di sinilah seharusnya perangkat Desa

¹⁰⁴Wawancara dengan Bapak Salimin Selaku Tokoh Adat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 14-02-2019, Pukul 14:00 Wib.

¹⁰⁵Wawancara dengan Bapak A. Rahman Selaku Tokoh Agama di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 16-02-2019, Pukul 09:30 Wib.

melibatkan Batin sebagai kepala adat, perihal berkaitan dengan akan di mekarkannya suatu Desa.

Didalam tokoh masyarakat biasanya ada orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat yang lainnya mengenai urusan-urusan tertentu itulah yang biasanya disebut istilah tokoh masyarakat, mereka seringkali memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu.

Menurut Bapak Badruddin selaku tokoh agama di pekon Suka Mulya Way Rantang terkait dengan pemekaran desa bahwa beliau dilibatkan untuk dimintai keputusan dalam musyawarah terkait dengan pengambilan keputusan desa untuk melakukan pemekaran dengan pertimbangan kemaslatah masyarakat. Beliau juga mendukung dengan adanya keputusan untuk memekarkan desa (*pekon*) ini, karena masyarakat di desa (*pekon*) mereka ini jauh sekali dari kata sejahtera. Terkait dengan dana desa mereka hanya mendapatkan seperempat dari desa induk dan infrastruktur yang sangat tidak diperdulikan oleh desa induk. Inilah gagasan yang membuat para tokoh masyarakat setempat untuk melakukan pemekaran desa (*pekon*).¹⁰⁶

Untuk melaksanakan pemekaran tersebut diperlukan adanya pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum masyarakat yang mewakili warga desa sebagai pelaksanaan keputusan pemekaran. Keputusan yang dihasilkan ditingkat desa pada umumnya merupakan tindak lanjut dari keputusan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Badruddin Selaku Tokoh Agama di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 16-02-2019, Pukul 11:00 Wib.

pemerintahan pusat dalam mengakomodasikan dan mengalokasikan hasil keputusan tersebut.

Setiap keputusan yang diambil didahului dengan prosedur yang akhirnya sampai pada kenyataan bahwa keputusan itu penting untuk diambil. Sahnya keputusan sangat tergantung pada mereka yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yaitu siapa yang memprakarsai dan siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan masyarakat mencakup sebuah dimensi kekuasaan.

Menurut Bapak Bambang selaku tokoh pemuda di pekon Suka Mulya Way Rantang, Peran tokoh masyarakat ini memegang peran sangat penting dalam proses pemekaran desa, menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Beliau dilibatkan terkait dengan masalah pemekaran desa dikarenakan kesenjangan yang dirasakan masyarakat setempat oleh desa induknya. Mendukung sepenuhnya dengan rencana pemekaran desa karena dengan pemekaran ini kemungkinan bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi, sosial, prasarana, maupun infrastruktur di desa (*pekon*) ini. Mereka dapat mempercepat proses difusi tetapi bisa pula mereka yang menghalangi dan menghancurkannya. Karena itu tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam proses musyawarah pemekaran desa. Tetapi jika kepala desa tidak hati-hati dan terbentur dengan tokoh masyarakat, maka ia

harus siap-siap menerima kegagalan atau setidaknya mendapatkan kesulitan dalam menjalankan tugas.¹⁰⁷

Menurut Bapak Misran selaku tokoh adat mengatakan bahwa pemekaran desa dulunya terjadi karena adanya kesenjangan dana desa dari desa induk dan terabainya pembangunan infrastruktur di pekon Suka Mulya Way Rantang. Beliau dilibatkan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemekaran pekon Suka Mulya Way Rantang. Serta mendukung sepenuhnya perencanaan terkait dengan pemekaran desa dengan melihat keadaan masyarakat yang sangat tidak mendapatkan pelayanan yang baik.¹⁰⁸

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan serta pemerataan pembangunan suatu daerah. Daerah pemekaran selain diberikan wewenang untuk mengatur mengurus serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga memberikan kesempatan dalam pembentukan daerah otonom sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang yang membolehkan, yakni dalam NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan suatu daerah baru, mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang Selaku Tokoh Pemuda di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 16-02-2019, Pukul 14:00 Wib.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Misran Selaku Tokoh Adat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 16-02-2019, Pukul 15:30 Wib.

Wawancara dengan bapak Darul Khotni selaku tokoh adat bahwa benar sebelum diadakan pemekaran desa para pemikir pemekaran desa ini melakukan musyawarah baik dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri serta para sesepuh pekon untuk mengambil keputusan demi terwujudnya kepentingan dan kemaslahatan bersama. Mendukung sepenuhnya terkait dengan perencanaan pemekaran desa supaya pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih baik seperti pada desa yang lainnya.¹⁰⁹

Pembentukan daerah pemerintahan dapat dilakukan dalam dua tipe atau bentuk, yaitu berupa penggabungan beberapa daerah atau beberapa daerah bersandingan, atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Berkaitan dengan pembentukan daerah ada dua hal yang mendasar untuk mendapatkan persetujuan pemekaran suatu daerah. Terkait dengan pemekaran desa bahwa benar tokoh masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pemekaran desa dan mendukung sepenuhnya rencana ini karena terkait dengan keadaan masyarakat yang susah dalam menempuh perjalanan ke desa induk disebabkan oleh infrastruktur jalannya rusak parah tidak kunjung diperbaiki dan dana desa dari desa induk hanya mendapatkan seperempat serta segala macam pelayanan jauh dari kata baik.¹¹⁰ Reformasi saat ini seolah-olah memberikan kemudahan setiap daerah melakukan pemekaran Desa dan tidak ada satupun daerah yang ingin melakukan penggabungan.¹¹¹

¹⁰⁹Wawancara dengan Bapak Darul Khotni Selaku Tokoh Adat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 18-02-2019, Pukul 09:30 Wib

¹¹⁰Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom, jakarta, h. 27.

¹¹¹Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Dan Pemekaran Daerah Otonom, jakarta, 2009.

Pembentukan suatu daerah pemekaran harus memenuhi prasyarat Administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. prasyarat Administrasi untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/ Walikota yang akan menjadi wilayah cakupan Provinsi, persetujuan DPRD Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi dari materi dalam negeri, syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, usul pembentukan daerah tidak di peroses apabila hanya memenuhi sebagian prasyarat saja.

Pembentukan dan pemekaran daerah harus bermanfaat bagi pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya dengan tujuan mempercepat pembangunan serta pemerataan pembangunan dalam suatu daerah.

Berkaitan dengan adanya pemekaran desa tokoh masyarakat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan bergotong royong dalam memenuhi syarat-syarat pemekaran desa dalam penyelenggaraan pemekaran, bahkan masyarakat setempat mau sokongan dana dalam proses pemekaran ini, baik dalam pembuatan plang jalan dan akses jalan sementara dalam waktu pemekaran pekon ini. Serta berperan langsung dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemekaran desa dan mendukung sepenuhnya terhadap keputusan ini guna untuk kepentingan bersama dan mewujudkan pelayanan agar lebih baik.¹¹²

Berkaitan dengan pemekaran desa tokoh masyarakat berperan penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan gagasan

¹¹² Wawancara dengan Bapak Wisnu Selaku Tokoh pemuda di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 18-02-2019, Pukul 11:30 Wib

ataupun keputusan dan harus diambil berdasarkan atas musyawarah kampung untuk mencapai keputusan bersama.

Tokoh masyarakat dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembangunan pekon dalam hal ini tokoh masyarakat dan masyarakat diberikan wewenang untuk mengurus pekon tentang pembangunan di pekon itu sendiri. Dalam Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon lembaga kemasyarakatan (tokoh masyarakat) yang ada di pekon mempunyai tugas:

- a. Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu pemerintah pekon dan memberdayakan masyarakat pekon.
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selama proses pemekaran desa bahwa benar tokoh masyarakat di pekon ini telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas-tugas dari tokoh masyarakat.¹¹³

Selain melaksanakan tugas-tugas dari tokoh masyarakat, peran tokoh masyarakat disini juga sangat berarti terlihat dari berbagai kegiatan lembaga yang sangat aktif. Di desa Suka Mulya Way Rantang terdapat tiga lembaga desa yaitu antara lain LPMD/LPMK, PKK, dan Karang Taruna. Menurut bapak Rohimin kegiatan LPMD sangat membantu masyarakat desa dalam bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan dan lingkungan hidup, dengan adanya kegiatan tersebut

¹¹³ Wawancara dengan Bapak M. Idris Selaku tokoh adat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 18-02-2019, Pukul 14:30 Wib.

membuat desa Suka Mulya Way Rantang menjadi lebih mengerti dan lebih paham arti sebuah keluarga, menjaga kesehatan dan menjaga serta melestarikan lingkungan hidup.¹¹⁴

Kegiatan PKK di desa suka mulya bisa dibilang aktif karena disamping berbagai kegiatan berkebun PKK ini juga aktif dalam berbagai perlombaan walaupun tidak mendapat juara. Menurut ibu Susi kegiatan PKK ini sangat membantu selain mempererat silaturahmi antara ibu- ibu desa suka mulya kegiatan PKK ini merupakan suatu kekompakan dalam melaksanakan berbagai kegiatan, salah satu contohnya saat berkebun misalnya saat menanam dan memanen kangkung antusias ibu-ibu PKK sangat luar biasa.¹¹⁵

Selain kegiatan LPMP dan PKK terdapat juga kegiatan karang taruna. Salah satu anggota karang taruna adalah Ahmad Zulfikar, dia mengatakan bahwa kegiatan karang taruna ini sangat aktif. Salah satu kegiatannya adalah selalu mempersiapkan acara tahunan seperti contohnya peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, selain kegiatan itu ada juga kegiatan rutin yang dilakukan karang taruna salah satu contohnya yakni voli dan futsal.¹¹⁶ Menurut bapak Zikrinal sebagai ketua karang taruna, ia mengatakan bahwa kegiatan karang taruna sangat aktif, hal ini yang membuat pemuda-pemudi desa Suka Mulya Way Rantang menjalin silaturahmi sangat erat. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan

¹¹⁴ Wawancara dengan Bapak Rohimin Selaku masyarakat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 18-02-2019, Pukul 16:00 Wib.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Susi Selaku Masyarakat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 19-02-2019, Pukul 11:30 Wib.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ahmad Zulfikar Selaku Anggota Karang Taruna di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 19-02-2019, Pukul 13:30 Wib.

karang taruna diberi pasilitas dalam melaksanakan kegiatan. Selain didukung oleh kepala desa peran aktif masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaanya.

Berdasarkan banyaknya kegiatan diatas, peran kepala desa dan peran tokoh masyarakat sangat mempengaruhi dan saling berhubungan karena terciptanya berbagai kegiatan merupakan terwujudnya hubungan yang baik antara kepala desa dan perangkat desa serta peran tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri.¹¹⁷ Kegiatan lain yang ikut aktif di desa suka mulya way rantang adalah kegiatan gotong royong, pengajian, dan poskamling. Menurut bapak Andian selaku Kasi Pemerintahan desa Suka Mulya Way Rantang mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang selalu ada dan selalu aktif dilakukan oleh masyarakat desa.¹¹⁸



¹¹⁷ Wawancara dengan Zikrinal Selaku Ketua Karang Taruna di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 19-02-2019, Pukul 14:30 Wib.

¹¹⁸ Wawancara dengan Andian Selaku Masyarakat di Pekon Suka Mulya Way Rantang, 19-02-2019, Pukul 16:00 Wib.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa di Pekon Suka

Mulya Way Rantang

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa di dalam pelaksanaan peraturan desa, tokoh masyarakat memiliki tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat pekon dalam setiap rencana yang diajukan peratin sebelum dijadikan keputusan pekon. Tokoh masyarakat juga menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Secara teori tokoh masyarakat dikatakan berperan apabila sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Tokoh masyarakat memiliki peran sebelum adanya pemekaran desa yaitu mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa.

Tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat desa Suka Mulya Way Rantang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting, oleh karena itu dianggap orang serba tahu dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat adat setempat. Sehingga segala tindak tanduknya merupakan pada aturan yang patut diteladani oleh masyarakat adat setempat mengingat kedudukan yang penting itulah tokoh masyarakat senantiasa dituntut berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik masyarakat

desa Suka Mulya Way Rantang, partisipasi tokoh masyarakat sangat vital dalam pemekaran desa untuk memberikan pendapat dalam musyawarah desa. Hal ini dapat dijelaskan pada sistem kemasyarakatan di desa.

Tokoh masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan menggali sumber daya untuk kesinambungan dan kelangsungan desa Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan mempunyai fungsi:

1. Menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan desa Suka Mulya Way Rantang seperti perbaikan jalan, pembangunan gedung pendididkan, perbaikan siring, dan pembuatan talut.
2. Menaungi dan membina kegiatan desa Suka Mulya Way Rantang seperti gotong royong, penggunaan lahan perkarang untuk ditanami tumbuhan apotik hidup dipekarangan masing-masing.
3. Menggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa (*pekon*) Suka Mulya Way Rantang seperti aktif dalam kegfiatan musyawarah desa, kegiatan PNPM, PPK, dan Diskusi Partai Politik.
4. Memberikan dukungan dalam pengelolaan desa Suka Mulya Way Rantang seperti adanya pencalonan kepala desa.
5. Mengkordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pemberian vaksin pada anak-anak yang berada dilingkungan desa Suka Mulya Way Rantang.
6. Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana belajar pada anak seperti TPA di masjid dan di mushola.

Terlibatnya tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan desa adalah untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis. Turut didorong oleh kesadaran untuk berpartisipasi politik secara aktif yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dalam kaitannya dengan pemekaran desa kepala desa lebih mengutamakan musyawarah desa, dimana dengan dilakukan musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakat akan disalurkan. Pasal 68 ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan/Pemekaran Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan dengan baik. Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) bahwa Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan tersebut dimulai dari tahap awal yaituodus (musyawarah dusun) dalam Pasal 54 ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap kedua adalah dilakukannya Musrembang (musyawarah perencanaan dan pembangunan) dilaksanakan di desa. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pemekaran desa. Setelah Musrembang dilakukan maka dibentuk panitia umum pemekaran desa yang membahas tentang syarat-syarat yang harus disiapkan dalam proses pemekaran desa.

B. Pandanga Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Pemekaran Desa di Pekon Suka Mulya Way Rantang

Tokoh masyarakat sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

Tugas utama yang harus diemban tokoh masyarakat adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Tokoh masyarakat dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya bahwa pemerintahan dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana pemerintahan desa menjalankan tugasnya, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya seperti yang dijelaskan dalam pandangan Islam atau menurut perspektif *fiqh siyasah* tokoh masyarakat sama dengan *Ahl Al Halli Wal al-Aqdi* yang diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Di dalam *fiqh Siyasah* peran tokoh masyarakat disebut dengan *ahlul halli wal aqdi* merupakan lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai

latar belakang yang diberi kewenangan untuk menyuarakan hati nurani dari masyarakat. Dalam surah Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-Imran:104).

Dari surah diatas menjelaskan bahwa hendaklah segolongan diantara kalian yang senantiasa mendirikan kewajiban berdakwah, memerintah kebajikan, dan melarang keburukan. artinya dengan mengajarkannya, memberi nasehat dan petunjuk, baik dengan tangan ataupun lisan. Dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada yang munkar adalah bagian dari *Fardhu Kifayah*, yang dikhususkan bagi pemilik ilmu yang mengetahui perihal apa yang diajarkannya dan apa yang dilarangnya sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia yang ada dalam syariat yang suci ini dan juga merupakan asas penting dari asas-asas syariat, karena dengannya sempurnalah aturan-aturannya, karena pemeluk setiap agama telah melenceng sebagian dari mereka dari agamanya disebabkan kebodohan mereka tentang agama atau karena mengikuti hawa nafsu mereka. Atau mungkin lalai dalam menjalankan kewajiban mereka, atau mungkin saling mendzalimi diantara mereka, maka apabila tidak ada orang yang membenarkan jalan mereka, menunjukkan petunjuk kepada yang tersesat, menasehati yang lalai, dan

menghentikan tangan zalim, maka kesesatan akan semakin banyak dan semakin besar hingga agama akan dilupakan dan akan berubah batasan-batasannya. Yakni orang-orang yang mendapat kekhususan dengan keberuntungan. Oleh karena itu, bukannya hanya pemimpin dan orang yang mendapat jabatan dalam suatu pemerintahan, tetapi orang yang berilmu dan masyarakat yang mempunyai ilmu yang tinggi boleh memberikan petunjuk dan memberikan ilmu pengetahuan kepada siapa saja, yang menurutnya melenceng atau keluar dari syariat Islam, orang yang melakukan kejahatan serta orang yang melakukan keburukan atau melakukan mungkar. Oleh karenanya peran tokoh masyarakat sangat penting dalam sistem pemerintahan desa. Dengan peran tokoh masyarakat aspirasi masyarakat tersalurkan dalam kegiatan musyawarah desa melalui tokoh masyarakat desa.

Peran tokoh masyarakat ini terlihat dari berbagai kegiatan lembaga yang dilaksanakan, antara lain kegiatan tersebut adalah kegiatan LPM, PKK, Karang Taruna, kegiatan gotong royong, pengajian, serta kegiatan poskamling. Hal tersebut terlihat dari peran tokoh masyarakat yang ikut terlibat dan terjun langsung dalam berbagai kegiatan yang ada di *Pekon* antara lain musyawarah pembangunan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tokoh masyarakat juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis berkesimpulan:

1. Peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa memiliki peranan yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga warga masyarakat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya. Tokoh masyarakat berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.
2. Dalam *Perspektif Fiqh Siyasah* tokoh masyarakat dikenal dengan lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, sejauh ini tokoh masyarakat telah berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan menyalurkan aspirasi dari masyarakat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.

B. Saran

Ditujukan kepada tokoh masyarakat supaya lebih berbaur lagi kepada warga desa agar warga desa yang mempunyai aspirasi bisa menyalurkannya dan kepada kepala desa agar lebih melibatkan lagi tokoh masyarakat dalam musyawarah desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshari, Abdul Hamid, *Asy-Syura Wa Atsaruha fi Ad-Dimaqrathiyyah*, As-Salafiyyah, kairo, 1990.
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Sinar Baru, Bandung, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Gema Ihsan, Jakarta, 2011.
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Cohen, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Departemen Agama R.I. *Al Quran dan Terjemahan*, Cv Diponegoro, bandung, 2005.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Dar Al-Qalam, Damascus, 2007.
- Dwi Narwoko, Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hendro, Puspito, *Pengatar Sosiologi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1997.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Iqbal, Muhammad, Dan Amien Husein Nasution, *Pemikir Politik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Kholid, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1985.

Levy, Marion, *Pengertian Masyarakat Menurut Devinisi Para Ahli* (Online), Tersedia Di: [Http://Genggamintecrnet.Com/Pengertian-Masyarakat-Menurut-Definisi-Para-Ahli.Html](http://Genggamintecrnet.Com/Pengertian-Masyarakat-Menurut-Definisi-Para-Ahli.Html). (8februari 2019).

Manzhur, Ibnu, *Lisan Al- 'Arab*, jus 6, Dar al-Shadr, Beirut, 1968.

Moeleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2010.

Munar, Musni, *Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Rakyat Dan Pembangunan*, Musnimunar.Wordpres.Com. Diposting 12 Juni 2013 Di Akses Pada Februari 2019.

Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Karya Toha Putra, Jakarta, 2000.

Nazir, M, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Nurkholis, Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2001.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Pekon.

Peraturan Daerah kabupaten Lampung Barat Nomor 03 tahun 2000 Tentang Pembentukan lembaga himpun pemekonan. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia diakses tanggal 29 januari 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ,pasal 5.

P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka mandiri, Surakarta, 2006.

Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Qodratilah, Meity Taqdir, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Badan Pengembang Dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2011.

Rahmawati, Tri, *Pemekaran Daerah Politik lokal dan Beberapa Isu terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Ramokoy, Donal A, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Rivai, Veithzal, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi1, Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sarwono, Sarlita Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Soeratno, *Metodologi Penelitian*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 1995.

Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan R&D*, Al-Fabeta, Bandung, 2010.

Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, LP2M IAIN Raden Intan lampung, Lampung, 2005.

Sutisno, Hadi, *Metode Research I*, YP Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

Syarif, Ibnu dkk, *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol Pasal 1 Ayat (6) .

Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 80.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 39 Ayat 2.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cv.Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2017.

-----,, Zuhraini, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila." *Al-'Adalah* vol 12 No1 2014 (bandar

Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2017), (on-line) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182> (13 Juli 2019) dapat di pertanggung jawabka secara ilmiah.

Sumber Lain

[Http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang konsep. Html](http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-konsep.Html),(05 Juni 2018).

[Http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/2013/06/Ruang-Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html](http://Kreatif123.Blogspot.Co.Id/2013/06/Ruang-Lingkup-Fiqh-Siyasah.Html) (6 Juni 2018).

[Https://www.suduthukum.com ruang-lingkup- siyasah-dusturiyah. html](https://www.suduthukum.com/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html) (14 oktober 2018)

<http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 5 februari 2019.

<http://www.lampungprov.go.id>. Diakses tanggal 14 mei 2019.

www.wikipedia.com





LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Kepala Desa
 - a. Bagaimana partisipasi dari tokoh masyarakat tentang pemekaran desa?
 - b. Bagaimana pendapat bapak terhadap perencanaan pemekaran desa?
 - c. Apakah tanggapan bapak terhadap pemekaran desa?
2. Wawancara Kepada Perangkat Desa
 - a. Bagaimana sejarah pemekaran desa?
 - b. Apakah bapak dilibatkan dalam pemekaran desa?
 - c. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pemekaran desa?
 - d. Apakah tokoh Masyarakat dilibatkan dalam pemekaran desa?
3. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pemekaran desa ini?
 - b. Apakah bapak dilibatkan dalam pemekaran desa?
 - c. Apakah bapak mendukung sepenuhnya terkait dengan perencanaan pemekaran desa?
 - d. Apakah sejarah dari pemekaran desa?
4. Wawancara Kepada Masyarakat Desa
 - a. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait dengan pemekaran desa?
 - b. Bagaimana sejarah pekon Suka Mulya Way Rantang?
 - c. Apakah bapak mendukung sepenuhnya terkait dengan adanya perencanaan pemekaran desa?
 - d. Apakah ada perbedaan terkait dengan setelah adanya pemekaran desa?